

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah *security of law*, *zakerheidsstelling*, atau *zakerheidsrechten*<sup>1</sup>. Lembaga jaminan diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Terjadinya peningkatan kebutuhan masyarakat dalam arus niaga harus diimbangi dengan pengaturan yang jelas dan lengkap mengenai lembaga penjamin. Pembinaan hukum terhadap bidang hukum jaminan adalah sebagai konsekuensi logis dan merupakan tanggung jawab dari pembinaan hukum untuk mengimbangi lajunya kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian, perseroan, pengangkutan dan kegiatan-kegiatan dalam proyek pembangunan<sup>2</sup>.

Salim HS memberikan perumusan hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Pada intinya hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara pemberi jaminan (debitur) dan

---

<sup>1</sup>Rachmadi Usman, S.H., M.H. , 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya disebut Rachmadi Usman I), hlm.1.

<sup>2</sup>DR. NY. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, S.H. , 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.6.

penerima jaminan (kreditor) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu)<sup>3</sup>.

Menurut Pasal 1131 KUH Perdata,

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Pasal tersebut menjelaskan mengenai jaminan umum. Jaminan umum memberikan kedudukan yang konkuren pada kreditor. Jaminan umum memberikan hak yang sama pada setiap kreditor untuk mendapatkan pelunasan utang dari debitor. Di samping jaminan umum, terdapat pula jaminan khusus. Jaminan khusus adalah jaminan yang lahir dari perjanjian. Agar seorang kreditor mempunyai kedudukan yang lebih baik dibandingkan kreditor konkuren, utang kreditor dapat diikat dengan hak jaminan yang bersifat khusus, sehingga kreditornya memiliki hak preferensi dalam pelunasan piutangnya<sup>4</sup>. Hak jaminan yang bersifat khusus dapat berupa hak jaminan yang bersifat kebendaan (*zakelijke zekerheidsrechten*) dan hak jaminan yang bersifat perseorangan (*persoonlijke zekerheidsrechten*).

Adapun hak jaminan perorangan adalah hak yang memberikan kepada kreditor suatu kedudukan yang lebih baik, karena adanya lebih dari seorang debitor yang dapat ditagih. Jaminan perseorangan dapat berupa penjaminan

---

<sup>3</sup>Rachmadi Usman I, *Loc.Cit.*

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm.75.

utang atau *borgtocht* (*personal guarantee*), jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), perikatan tanggung menanggung, dan garansi bank (*bank guarantee*). Sedangkan hak jaminan yang bersifat kebendaan harus kebendaan yang dapat dinilai dengan uang atau bernilai ekonomis ketika dijual serta dipindahtangankan atau diasingkan kepada orang lain<sup>5</sup>. Jaminan kebendaan dapat berupa kebendaan bergerak dan jaminan kebendaan tidak bergerak. Pembebanan utang dengan lembaga hak jaminan fidusia adalah salah satu jaminan utang untuk kebendaan bergerak.

Fidusia dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah “Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan”. Dalam terminologi Belanda istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendom Overdracht*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*<sup>6</sup>. Pada fidusia, berbeda dengan gadai, yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditur adalah hak milik sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, sehingga yang terjadi adalah penyerahan secara *constitutum possessorium*<sup>7</sup>.

Pendaftaran Jaminan Fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastiaan hukum bagi para pihak, baik bagi Pemberi Fidusia maupun Penerima Fidusia, sehingga memberikan perlindungan hukum terhadap

---

<sup>5</sup>Ibid, hlm.77.

<sup>6</sup>Munir Fuady, S.H.,M.H.,LL.M. , 2003, *Jaminan Fidusia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.3.

<sup>7</sup>Oey Hoey Tiong, S.H. , 1984, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, hlm.21.

kreditor atau Penerima Fidusia serta pihak ketiga lainnya. Mengingat betapa pentingnya fungsi pendaftaran bagi suatu Jaminan Fidusia, maka Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kemudian mengaturnya dan mewajibkan setiap Jaminan Fidusia untuk didaftarkan pada pejabat berwenang. Kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia ke instansi yang berwenang merupakan salah satu perwujudan dari asas publisitas sehingga kreditor dan khalayak ramai dapat mengetahui informasi-informasi penting di sekitar jaminan utang tersebut<sup>8</sup>.

Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dibentuk Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Pendaftaran Jaminan Fidusia secara manual di Kantor Pendaftaran Fidusia pada penerapannya memiliki beberapa kendala, antara lain tidak tercapainya pelayanan *one day service* mengingat permohonan yang masuk sangat banyak melampaui kemampuan sumber daya manusia dan sarana yang ada. Pendaftaran Jaminan Fidusia secara manual juga membutuhkan biaya yang cukup mahal apabila calon pendaftaran harus datang secara langsung ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

---

<sup>8</sup>Munir Fuady, S.H.,M.H.,LL.M., *Op. Cit.*, hlm.30.

Perlu diciptakan pola pelayanan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik (*online system*) untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik diberlakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan sehingga lebih mudah, cepat, dan murah.

Pendaftaran jaminan fidusia secara *online system* memberikan kewenangan kepada Notaris untuk dapat bertindak sebagai Penerima Kuasa dari Pemohon pendaftar fidusia sehingga tidak perlu repot untuk datang secara langsung ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia di wilayah kerjanya. Namun, pembubuhan tanda tangan secara elektronik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia pada Sertifikat Jaminan Fidusia menimbulkan ketidakpastian mengenai tanggung jawab hukum apabila terjadi kesalahan pengisian data dalam dokumen elektronik dilakukan melalui *online system* oleh Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dibebani pula tanggung jawab atas perbuatan sehubungan dengan pekerjaannya

dalam pelaksanaan kewenangannya tersebut. Pendaftaran yang dilakukan di kantor Notaris memerlukan koneksi internet yang lancar karena koneksi yang terganggu akan mempengaruhi kelancaran penyimpanan data. Tidak tersedianya *database* untuk mengecek obyek fidusia yang telah didaftarkan menjadi kendala pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara *online*. Kendala tersebut mempengaruhi pertanggungjawaban Notaris secara hukum sesuai dengan batasan kewenangan yang diberikan kepadanya.

Pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia yang diharapkan dapat membawa kemudahan dan semakin menjangkau kebutuhan masyarakat harus diimbangi tentang kejelasan tanggung jawab hukum dari pihak Pejabat yang berwenang dalam proses pendaftaran tersebut. Kesalahan data yang dapat muncul patut diperhitungkan demi tegaknya kepastian hukum bagi seluruh pihak dalam pendaftaran jaminan fidusia. Notaris dalam melayani kepentingan masyarakat harus melaksanakan kewenangannya secara profesional serta tunduk pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana tanggung jawab hukum Notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (*online system*) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa hal mengenai tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini, yaitu :

1. Tujuan Subyektif

Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan jenjang pendidikan Strata Satu (S-1) dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Tujuan Obyektif

Untuk mengkaji dan mengetahui tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (*online system*).

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan akademis maupun kepentingan praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan pengetahuan tentang pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (*online system*)
- b. Menambah kekayaan referensi dan khasanah hasil penelitian pada bidang hukum, khususnya mengenai hal-hal yang

bersangkutan dengan tanggung jawab hukum Notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (*online system*)

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan dan umpan balik bagi para pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (*online system*)
- b. Memberikan penjelasan secara lebih detail bagi pihak mana pun yang membutuhkan informasi mengenai pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (*online system*)
- c. Memberikan pandangan mengenai pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang berwenang dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (*online system*)

**E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum yang memiliki keterikatan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis diantaranya penelitian mengenai :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Made Widyasari, NIM : 1292462005, Program Magister, Program Studi Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Tahun 2015, Judul Penelitian : Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem *Online*. Rumusan Masalah : a. Bagaimanakah pengaturan tata cara pendaftaran jaminan fidusia yang lewat waktu 60 (enam puluh) hari setelah Peraturan Menteri



Nomor 10 Tahun 2013 ditetapkan? ; b. Bagaimanakah akibat hukum jaminan fidusia yang tidak terdaftar dalam sistem *online*? Hasil Penelitian : a. Jaminan fidusia yang lewat waktu dari 60 (enam puluh) hari setelah Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 ditetapkan menjadi gugur. Gugurnya pendaftaran jaminan fidusia tersebut dikarenakan persyaratan yang paling essensi dari tata cara pendaftaran jaminan fidusia tidak terpenuhi, yaitu tidak melakukan PNBP, sehingga pemohon harus mendaftarkan kembali dengan sistem pendaftaran jaminan fidusia *online* ; b. Akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia yang tidak terdaftar dalam sistem *online* adalah tidak mempunyai status sebagai kreditur yang didahulukan (*preference*) terhadap kreditur lainnya sehingga terjadi perubahan status dari kreditur *preference* menjadi kreditur konkuren. Akibat lain dari jaminan fidusia yang tidak terdaftar dalam sistem *online* yaitu : a. Tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan ; b. Tidak memenuhi asas publisitas ; c. Pihak penerima jaminan fidusia tidak mempunyai sertifikat jaminan fidusia yang mana dapat digunakan untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Immas Anggun Cahya, NIM : 12/339194/PHK/07489, Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Tahun 2014, Judul Penelitian : Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia *Online* Terhadap

Penerima Fidusia. Rumusan Masalah : a. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris dalam pendaftaran fidusia *online* terhadap penerima fidusia? ; b. Faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam proses pendaftaran fidusia *online*? Hasil penelitian : a. Surat Edaran Direktur Jenderal AHU Nomor 06.OT.03.01 tanggal 5 Maret 2013 mengatur pelaksanaan pendaftaran fidusia dengan sistem *online*. Proses pendaftaran ini dilakukan oleh Notaris. Dilakukan pendaftaran oleh Notaris dan pembuatan aktanya ini hanya sebatas syarat formil untuk memenuhi peraturan. Surat Edaran ini sebenarnya mengeliminasi keberadaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia karena peraturan di dalam Undang-Undang seharusnya lebih tinggi daripada Surat Edaran, untuk mendaftarkan fidusia dasarnya adalah surat kuasa. Namun kuasa ini bersifat paksa karena tidak ada kesepakatan dan hanya mengikuti aturan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal AHU tersebut pendaftaran fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia menjadi tanggung jawab Notaris, karena Notaris yang mempunyai sarana untuk pendaftaran secara *online*. Peranan Notaris dalam hal ini hanya sebatas pada perjanjian utang piutangnya serta mendaftarkan saja ke Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Pendaftaran dengan Akta Notaris sesuai yang diamanatkan undang-undang itu untuk memenuhi syarat formilnya. Apabila Notaris tidak mendaftarkannya akhirnya akan timbul permasalahan dan ia dapat

dituntut oleh penerima fidusianya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan Akta Notaris sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tersebut. Pemilihan untuk menggunakan akta autentik yang hanya bisa dilakukan oleh pejabat yang berwenang ini demi melindungi kepastian hukumnya terlebih lagi proses pendaftaran fidusia yang dilakukan dengan sistem baru ini hanya Notaris yang bisa mendaftarkan maka Notaris tidak boleh lalai tidak mendaftarkan atau salah dalam proses pendaftarannya Notaris dapat dituntut ganti rugi. ; b. Keberadaan fidusia *online* sangat memberikan manfaat bagi Notaris, terlebih dalam hal efisiensi waktu dan biaya karena para pihak tidak perlu lagi datang ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang ada di tingkat Kantor Wilayah Tingkat I (satu) di propinsi. Fidusia *online* memberikan manfaat karena tidak ada penyerahan data fisik ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Hambatan dalam proses pendaftaran fidusia dengan cara baru ini bisa hambatan yang bersumber dari peraturan hukum yang mengatur itu sendiri seperti adanya beberapa peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbeda dengan apa yang sudah ada dalam prakteknya. Hambatan yang berasal dari luar peraturan hukum fidusia, yang datang dari dalam masyarakat sendiri seperti seperti belum memahami juga bahwa prosesnya sudah dilakukan secara *online*. Hambatan yang ada juga mengenai proses royalti sertifikat

yang belum terakomodasi secara *online*. Menurut responden adanya faktor pendukung dan penghambat dalam sebuah sistem baru ini tetap tidak mengganggu kinerja untuk melakukan pendaftaran fidusia.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Tanggung jawab hukum menurut Ridwan Halim adalah sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.<sup>9</sup>
2. Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
3. Peran Notaris adalah tindakan yang dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

---

<sup>9</sup>Ridwan Halim, 1988, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.23.

30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

4. Jaminan Fidusia Fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
5. Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik adalah pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh Pemohon dengan mengisi aplikasi secara elektronik.

## **G. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran ilmu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Adapun metode yang


digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

#### 1. Sumber Data

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

- 
- 5) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
  - 6) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
  - 7) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Serifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik
  - 8) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik
  - 9) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik
  - 10) Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 5 Maret 2013 Nomor 06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Jaminan Fidusia Secara Elektronik Atau *Online System*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

2. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Wawancara

Peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Narasumber Kepala Subbidang Pelayanan AHU dan HKI Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai lima (5) tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, intepretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukum).



Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan.

#### 4. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/ prosedur bernalar digunakan secara deduktif.

### **H. Sistematika Penulisan Hukum**

#### 1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

#### 2. BAB II PEMBAHASAN

##### A. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia

###### 1. Pengertian Jaminan

###### 2. Pengertian Jaminan Fidusia

###### a. Ruang Lingkup, Subjek, dan Objek Jaminan Fidusia

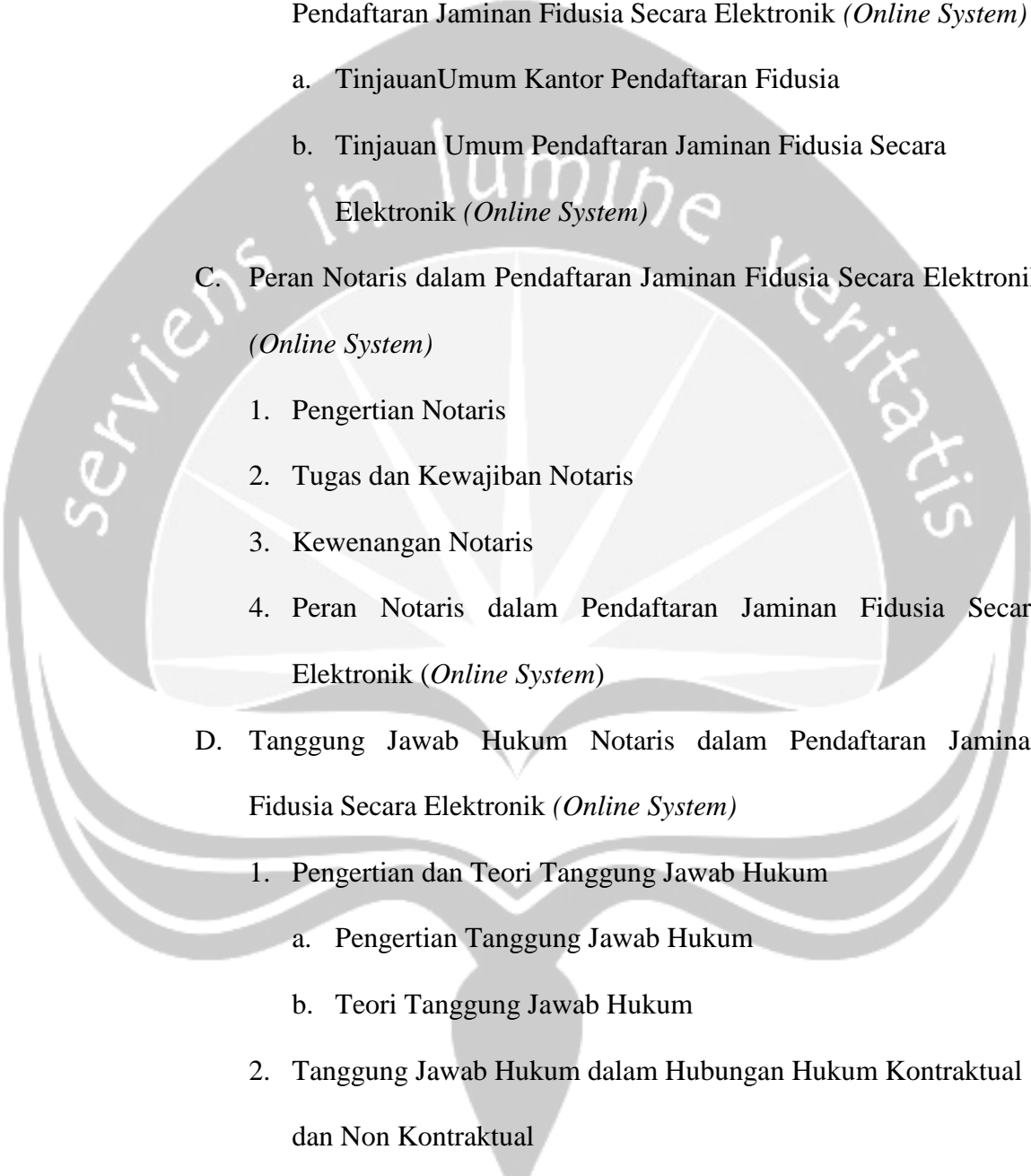
###### b. Pengaturan Jaminan Fidusia

##### B. Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*)

###### 1. Dasar Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia

###### 2. Arti Penting Pendaftaran Jaminan Fidusia

###### 3. Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*)

- 
4. Tanggung Jawab Hukum Kantor Pendaftaran Fidusia dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*)
    - a. Tinjauan Umum Kantor Pendaftaran Fidusia
    - b. Tinjauan Umum Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*)
  - C. Peran Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*)
    1. Pengertian Notaris
    2. Tugas dan Kewajiban Notaris
    3. Kewenangan Notaris
    4. Peran Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*)
  - D. Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*)
    1. Pengertian dan Teori Tanggung Jawab Hukum
      - a. Pengertian Tanggung Jawab Hukum
      - b. Teori Tanggung Jawab Hukum
    2. Tanggung Jawab Hukum dalam Hubungan Hukum Kontraktual dan Non Kontraktual
    3. Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*)

### 3. BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi penutup yaitu kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.

